

# Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Aceh)

Imilda<sup>1\*</sup>, Sufyan<sup>2</sup>, Rahmi Hajriyanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, AMIK  
Indonesia, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2012 hingga 2016 serta mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang secara signifikan mempengaruhi ketimpangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data data panel selama 5 tahun dari 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2012 hingga 2016 sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah perkembangan pembangunan ekonomi tiap daerah, ketimpangan pembangunan ekonomi daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Aceh maka dapat disimpulkan 1) Ketimpangan pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang dihitung dengan menggunakan Entropy Theil periode 2012- 2016 menunjukkan ketimpangan semakin melebar, 2) Urutan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang memiliki nilai pertumbuhan yang minus/negatif yaitu Kota. Lhokseumawe, Kabupaten. Aceh Utara dan Kabupaten. Aceh Timur, 3) Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang dianalisa menggunakan Indeks Entropy Theil menunjukkan adanya kemajuan peningkatan ditiap tahun dari tahun 2012-2016 terdapat di Kota. Subulussalam, Kota Langsa dan Kota Sabang, 4) Sumber Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebagian dihasilkan dari sektor-sektor perekonomian seperti: sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor perindustrian, sektor perkebunan, sektor pengangkutan, sektor informasi dan komunikasi, dan 5) Berdasarkan uji menggunakan trendline linear terdapat 7 Kab/Kota dari 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yaitu Kabupaten. Simeulue, Kabupaten, Aceh Besar, Kabupaten. Aceh Barat Daya, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten. Bener Meriah, dan Kota Subulussalam yang bernilai R2 mendekati 1 dan relatif kuat yaitu variabel bebas menerangkan variabel terikat.

**Kata kunci:** Pertumbuhan Ekonomi; Ketimpangan Pembangunan; Entropy Theil, Trendline.

**Abstract.** This study aims to analyze economic growth and development in the District/City of Aceh Province for the period 2012 to 2016 and identify the economic growth of the District/City in Aceh Province which has a significant influence. The data used in this study is 5-year panel data from 23 regencies/cities of Aceh Province from 2012 to 2016, while the object of this research is the development of economic development in each region, regional economic development and the factors that influence it. Based on the results of growth and the Aceh Province's inter-regional economic development in Aceh Province, it can be ascertained that 1) Inequality of economic development in Aceh Province Regency/City which is calculated using Entropy for the 2012-2016 Period shows an increase, 2) The order of Aceh Regency/City which has a high growth value minus / negative namely City. Lhokseumawe, Regency. North Aceh and the District. East Aceh, 3) economic growth and income which were analyzed using Theil Entropy Index showed an increase every year from 2012-2016 in the City. Subulussalam, Langsa City and Sabang City, 4) Sources of economic growth in Aceh Province are partly generated from economic sectors such as agriculture sector, implementation sector, industrial sector, plantation sector, transportation sector, information, and communication sector, and 5) Based on In the test using a linear trendline, there are 7 regencies/cities out of 23 regencies/cities in Aceh Province, namely regencies. Simeulue, District, Aceh Besar, District. Southwest Aceh, Sabang City, Langsa City, Bener Meriah Regency, and Subulussalam City which deserve R2 close to 1 and are relatively strong, namely the independent variable explains the variable.

**Keywords:** Economic Growth; Development Inequality; Entropy Theil, Trendline.

\*Author. Email: [imilda@amikindonesia.ac.id](mailto:imilda@amikindonesia.ac.id)<sup>1\*</sup>, [sufyan@amikindonesia.ac.id](mailto:sufyan@amikindonesia.ac.id)<sup>2</sup>, [rahmiyajriyanti@amikindonesia.ac.id](mailto:rahmiyajriyanti@amikindonesia.ac.id)<sup>3</sup>

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.614>

Received: 8 February 2022, Revision: 27 March 2022, Accepted: 23 April 2022, Available Online: 1 July 2022.

Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204.

Copyright © 2022. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

## **Pendahuluan**

Pembangunan perekonomian di Aceh telah berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh (Amri, 2017). Hasil pencapaian pembangunan yang dirasakan masyarakat adalah Agregat pembangunan dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintahan dan masyarakat (Edi, Saputra, & Husna, 2022; Ikhsan & Zulkifli, 2022). Disisi lain, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh penentu kebijakan ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kab/Kota di Provinsi Aceh dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber modal. Hal yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimilikinya, sehingga dapat menganalisis sektor-sektor tersebut dan memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah.

Sementara itu pembangunan daerah merupakan pembangunan yang dimaksudkan untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zuliyah, 2010; Aulia, 2012). Pembangunan yang dilaksanakan daerah meliputi berbagai bidang, salah satunya pembangunan ekonomi (Wenda & Akib, 2015; Daryanto & Hafizrianda, 2018). Arsyad (2017) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Malau, 2016; Jafar, 2017). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata (Jafar, 2017; Badriah, 2019). Masalah pertumbuhan

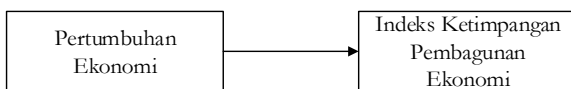
ekonomi di suatu daerah tergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri (Sunusi, 2014). Kebijakan pemerintah tersebut harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat supaya pertumbuhan ekonomi dapat tercapai di suatu daerah (Firmansyah & Astuti, 2021; Rakhman & Saputri, 2020).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil, dimana harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sukirno, 2004). Data PDRB digunakan untuk menunjukkan produktivitas ekonomi suatu daerah, suatu daerah dikatakan makmur apabila, nilai PDRB Per-kapita semakin tinggi. Pembangunan ekonomi di Aceh tingkat indikator keberhasilan pembangunannya diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) secara Absolut selama 5 tahun (2012–2016). Hasil dari evaluasi PDRB selama 5 tahun (2012-2016) terjadi peningkatan 5 persen dari tahun 2012 ke 2014 dan menurun pada tahun 2015 sebesar 1,16 persen kemudian, mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 4 persen. Hal lainnya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk masing-masing disetiap Kab/Kota di Provinsi Aceh terdapat nilai PDRB ADHB Per-Kapita Kab/Kota yang mempunyai pendapatan PDRB ADHB tertinggi pada tahun 2012 s/d 2016 terdapat pada Kab. Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Kab. Bireun, Kab. Aceh Timur, dan Kota Lhokseumawe. Untuk pendapatan PDRB ADHB yang terendah pada tahun 2012 s/d 2016 terdapat di Kota Sabang dan Kota Subulussalam. Hal ini menunjukkan tingkat persebaran pendapatan di Provinsi Aceh tidak merata. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah; 1) Untuk menganalisis besarnya ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kab/Kota di Provinsi Aceh, dan 2) Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Provinsi Aceh.

## Metodologi Penelitian

### Kerangka dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terkait dengan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data data panel selama 5 tahun dari 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2012 hingga 2016 sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah perkembangan pembangunan ekonomi tiap daerah, ketimpangan pembangunan ekonomi daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan antar Daerah di Provinsi Aceh

### Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS), data Bank Sentral Republik Indonesia (BI), Jurnal dan Buku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur dan jurnal yang sesuai sebagai sumber atau bahan kajian.

### Definisi Operasional

Operasional variabel penelitian terdiri dari variabel dependent dan variabel independent masing- masing tersebut. Indeks Ketimpangan adalah Variabel Dependent Indeks Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan pada suatu daerah dengan daerah lain yang berbeda dalam suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi Regional (Y), dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar harga berlaku Kab/Kota Provinsi Aceh tahun 2012-2016 (dalam satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Y = \{(PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_t\} \times 100\%$$

Dimana:

- Y : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota tahun t  
 PDRB<sub>t</sub> : PDRB ADHB Kabupaten/kota tahun t  
 PDRB<sub>t-1</sub> : PDRB ADHB Kabupaten/kota tahun t-1 (tahun sebelumnya).

### Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif, dan Perhitungan Indeks ketimpangan. Sedangkan untuk menghitung indeks ketimpangan menggunakan alat analisis Entrophy Theil. Dengan formulasi Indeks Theilnya yaitu:

$$I_{intra} = \sum (y_i / Y) \cdot \text{Log} \{ (y_i / Y) / (n_i / N) \}$$

Dimana:

- I<sub>Intra</sub> : Indeks Entrophy Theil Intra Region  
 Y<sub>i</sub> : PDRB perkapita di Daerah i  
 Y : Rata-rata PDRB Provinsi Aceh  
 N<sub>i</sub> : jumlah penduduk Daerah i  
 N : Jumlah keseluruhan penduduk Provinsi Aceh.

## Hasil dan Pembahasan

### Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per-Kapita

Salah satu keberhasilan pembangunan dapat melihat dari segi aspek perekonomian suatu wilayah, tidak hanya dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), akan tetapi juga dapat dilihat dari besarnya pendapatan perkapita. Perkembangan pendapatan PDRB ADHB Per-kapita di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh ditunjukkan pada Tabel 4.1 dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2016. Di tahun 2012 PDRB Per-kapita per Kab/Kota tertinggi terdapat Kab. Aceh Utara sebesar 19,7 Triliun diikuti Kota Banda Aceh 11,5 Triliun, Kota Lhokseumawe 9,3 Triliun, Kab. Bireun 8, 3 Triliun, Kab. Aceh Besar 8,1 Triliun, Kab. Aceh Utara 8 Triliun Untuk PDRB perkapita per Kab/Kota terendah terdapat Kota Sabang sebesar 857,2 Miliar.

Pada tahun 2016 PDRB ADHB Per-kapita Per Kab/Kota tertinggi terdapat Kab. Aceh Utara sebesar 16,69 Triliun diikuti Kota Banda Aceh 15,81 Triliun, Kab. Aceh Besar 10,96 Triliun, Kab. Bireun 10,72 Triliun, Kab. Aceh Timur 8,5 Triliun dan Kab. Pidie 8,48 Triliun untuk PDRB per kapita per Kabupaten/Kota terendah terlihat di Kota Sabang sebesar 1,15 Triliun Sementara untuk rata-rata PDRB

ADHB Per-kapita Pertahun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2016 cenderung bervariasi. Namun, jika dilihat juga terdapat rata-rata PDRB Per-kapita Per Kab/Kota ada yang tinggi terdapat Kab. Aceh Utara sebesar 18,56 Triliun diikuti Kota Banda Aceh 13,59 Triliun, Kab. Aceh Besar 9,59 Triliun, Kab. Bireun 9,46, Kota Lhokseumawe 8,71 Triliun dan Kab. Aceh Timur sebesar 8,38. Dan rata-rata PDRB perkapita per Kab/Kota terendah yakni Kota Sabang sebesar Rp. 999,7 Miliar.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi oleh masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan yang sebenar-benarnya barang dan jasa yang di produksi dalam perekonomian. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah perlu dihitung pendapatan PDRB atas dasar harga berlaku ADHB. Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada periode 2012 – 2016 di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh berfluktuasi. Hal ini dipengaruhi PDRB serta perkembangan kesempatan kerja. Selama kurun waktu 2014-2015 pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan yang sangat dratis terdapat di Kota Lhokseumawe sebesar -2,76 persen tahun 2014 dan ditahun 2015 sebesar 22,07 persen diikuti oleh Kab. Aceh Utara sebesar -0,70 persen tahun 2014 dan ditahun 2015 sebesar 22,04 dan di Kab. Aceh Timur pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 6,09 persen. Namun untuk Kab/Kota yang lain terdapat adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi dan sebagainya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga ditunjang oleh faktor non ekonomi, seperti lembaga sosial, sikap budaya, pendidikan, tenaga kerja, nilai moral, kondisi politik, dan kelembagaan dari daerah tersebut.

### **Perhitungan Indeks Entrophy Theil**

Pengurangan ketimpangan melalui kebijakan pembangunan di Provinsi Aceh kurang memberikan hasil yang positif. Proses pembangunan justru menimbulkan

permasalahan yang mempertanyakan keadilan dan pemerataan. Melalui besaran nilai ketimpangan pembangunan dengan menggunakan data PDRB ADHB, PDRB ADHB perkapita serta jumlah penduduk, besarnya ketimpangan masing-masing Kab/Kota dapat diketahui dengan menggunakan hitungan Indeks Entrophy Theil. Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan besarnya ketimpangan didalam masing-masing antar Kab/Kota Provinsi Aceh. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di tiap-tiap Kab/Kota sangat bervariasi. Apabila angka ketimpangan mendekati 0 menunjukkan bahwa ketimpangan yang kecil atau merata, sedangkan ketimpangan yang mendekati 1 menunjukkan bahwa ketimpangan mengalami pelebaran. Namun yang terjadi ketimpangan di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh tidak ada yang ketimpangannya mendekati 1 jika ketimpangannya mendekati 0 menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kab/Kota provinsi Aceh masih kecil atau merata. hal ini terlihat masih kecil pengaruh ketimpangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi terutama pendapatan PDRB.

### **Analisis Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh**

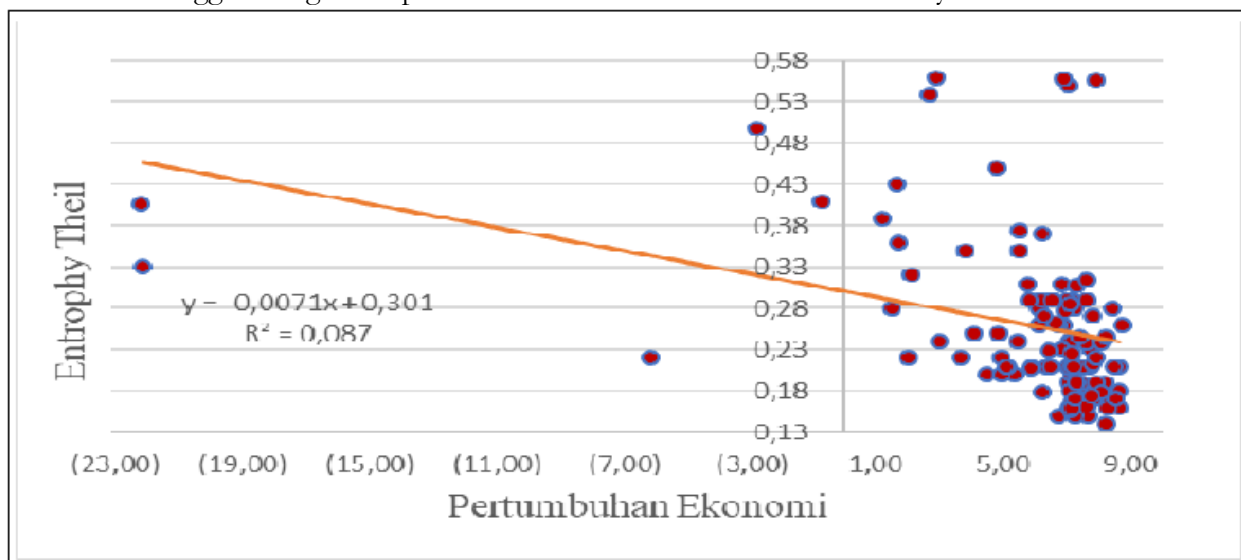
Provinsi Aceh mempunyai 23 Kab/Kota, dalam mengukur kinerja ekonomi disuatu Kab/Kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah. Selain PDRB dapat juga di lihat dari suatu daerah dibagian pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menunjukkan keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi dari suatu keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan hasil dari data dalam kurun waktu 2012-2016 menggunakan perhitungan Indeks

Entropy Theil, dari 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh yang digunakan dalam penelitian ini terdapat adanya ketimpangan pembangunan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

### Analisis Keseluruhan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh

Selanjutnya keseluruhan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh tahun 2012-2016. Hasil trendline yang menurun, artinya, rasio tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan (*Entropy Theil*) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga mengalami perlambatan di

sektorsektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh. Selama periode 2012-2016 tingkat ketimpangan meningkat sebesar 0,62 persen. Sementara koefisien ketimpangan pendapatan jika dilakukan kebijakan intervensi dalam penanggulangan ketimpangan maka ketimpangan pendapatan akan berkurang sebanyak -0,0071 persen, namun jika tidak dilakukan kebijakan intervensi terhadap ketimpangan pendapatan akan menjadi 0,301 persen. Sedangkan hubungan antara variabel bebas (pertumbuhan ekonomi) dan variabel terikat (*entropy theil*) yang ditunjukkan oleh nilai  $R^2 = 0,087$  persen, relatif lemah, karena variabel bebas tidak dapat menerangkan 0,087 persen variasi variabel terikatnya.



Gambar 2. Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Entropy Theil 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Aceh maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah 23 Kab/Kota Provinsi Aceh yang dihitung dengan menggunakan *Entropy Theil* selama periode 2012- 2016 menunjukkan ketimpangan semakin melebar.
- 2) Urutan Kab/Kota Dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki nilai pertumbuhan yang minus/negatif yaitu Kota. Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Timur.
- 3) Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang dianalisa menggunakan *Indeks Entropy Theil* menunjukkan adanya kemajuan peningkatan di tiap tahun dari tahun 2012-2016 terdapat di Kota. Subulussalam, Kota Langsa dan Kota Sabang.
- 4) Sumber Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sebagian dihasilkan dari sektor-sektor perekonomian seperti: sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor perindustrian, sektor perkebunan, sektor pengangkutan, sektor informasi dan komunikasi.



- 5) Berdasarkan uji menggunakan trendline linear terdapat 7 Kab/Kota dari 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh yaitu Kab. Simeulue, Kab, Aceh Besar, Kab. Aceh Barat Daya, Kota Sabang, Kota Langsa, Kab. Bener Meriah, dan Kota Subulussalam yang bernilai R2 mendekati 1 dan relatif kuat yaitu variabel bebas menerangkan variabel terikat.

## Daftar Pustaka

- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Data Panel 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal EMT Kita*, 1(1), 1-11.
- Arsyad, L. (2017). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Tersedia secara online di: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESP44324-M1.pdf> [diakses di Lembang, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018]*.
- Aulia, Y. (2012). Paradigma peningkatan pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata di Era Otonomi Daerah. *Jurnal EMAS (Ekonomi, Manajemen dan Bisnis)*, 6(1).
- Badriah, L. S. (2019). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1).
- Daryanto, A., & Hafizrianda, Y. (2018). *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. PT Penerbit IPB Press.
- Edi, S., Saputra, J., & Husna, A. (2022). Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 1-6.
- Firmansyah, M., & Astuti, E. (2021). Analisis Pola Dan Struktur Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Mataram Dan Hubungan Kota Mataram Dengan Kabupaten Sekitarnya Di Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 17-25.
- Ikhsan, I., & Zulkifli, Z. (2022). Pengaruh Pendapatan Perempuan Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 184-190.
- Jafar, J. (2017). *Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengangguran di Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Malau, N. A. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 2(1), 1-8.
- Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Sunusi, D. (2014). Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Wenda, W. L., & Akib, H. (2015). Pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 43-51.
- Zuliyah, S. (2010). Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(2).